

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “Gap Expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, serta ancaman yang belum terantisipasi.

Suatu Perencanaan yang baik diawali dengan melakukan analisa terhadap lingkungan strategis agar perencanaan yang dibuat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan yang ditangani. Begitu pula dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindagkop UKM Tahun 2019–2023. Alam rangka pemenuhan kebutuhan dan permintaan pasar.

Untuk membangun daya saing yang berkelanjutan, upaya pemanfaatan seluruh potensi sumber daya unggulan daerah dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada secara optimal. Oleh karenanya esensi daya saing yang berkelanjutan tersebut terletak pada cara menggerakkan dan mengorganisasikan seluruh potensi sumber daya produktif.

Identifikasi permasalahan dilaksanakan untuk mengetahui isu-isu strategis yang ada. Permasalahan – permasalahan yang muncul terkait tugas fungsi selama rentang waktu antara tahun 2019-2023 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM antara lain :

1. Masih rendahnya produk IKM yang berbasis komoditas unggulan
2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
3. Perlunya peningkatan ketersediaan informasi harga produk
4. Masih rendahnya jumlah kemitraan antara ukm dengan toko modern
5. Masih rendahnya alat ukur takar timbang yang dilakukan tera ulang
6. Masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di zona larangan pk1
7. Masih rendahnya peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan omset
8. Masih banyaknya UKM yang tidak aktif serta berganti-ganti jenis usaha

Gambaran secara detail pokok masalah, masalah, dan akar masalah tersaji pada

TABEL 3.1

AKAR MASALAH, MASALAH DAN MASALAH POKOK

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih rendahnya daya saing produk IKM yang berbasis komoditas unggulan	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya daya saing produk berbasis komoditas unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya perlindungan produk berbasis komoditas unggulan Kurangnya diversifikasi produk berbasis unggulan daerah
		<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kapasitas industri kecil 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya produktifitas industri kecil Rendahnya penerapan sistem manajemen produksi
2	Masih rendahnya sarana dan prasarana perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> Belum semua pasar daerah dalam kondisi baik Masih ditemukannya area pasar yang rusak
		<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pendapatan retribusi pengelolaan pasar 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi untuk memaksimalkan potensi retribusi Kurangnya kesadaran pemilik los/ kios untuk membayar retribusi
3	Perlunya peningkatan ketersediaan informasi harga produk	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedianya media informasi harga yang diperbarui setiap hari 	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya koordinasi yang kuat antara petugas pengumpul data dengan petugas perekap data Belum adanya media informasi harga yang mudah diakses semua orang
4	Masih rendahnya jumlah kemitraan antara ukm dengan toko modern	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedianya informasi jaringan kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya informasi toko modern yang bersedia bermitra Kurangnya hubungan bisnis to bisnis antar UKM
5	Masih rendahnya alat ukur yang dilakukan tera ulang	<ul style="list-style-type: none"> Masih sedikit pemilik alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang melakukan tera ulang 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman tentang tera dan/ tera ulang Rendahnya jangkauan pelayanan tera dan/ tera ulang
6	Masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di zona larangan pkL	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kesadaran akan zonasi larangan pedagang kaki lima 	<ul style="list-style-type: none"> Masih sedikitnya area PKL Banyaknya PKL yang belum tertampung di lokasi PKL Masih rendahnya kualitas PKL
7	Masih rendahnya peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan omset	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyaknya koperasi yang belum mendapatkan nilai sehat 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya pengawasan, pembinaan koperasi Rendahnya SDM koperasi yang kompeten
		<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya pertumbuhan omset, aset dan anggota koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota koperasi Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi
8	Masih banyaknya UKM yang tidak aktif serta berganti-ganti jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kompetensi UKM Rendahnya akses permodalan 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya ketrampilan UKM Rendahnya pengetahuan UKM akan manajerial usaha Rendahnya pengetahuan akan akses permodalan

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2019 – 2023

VISI

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”

Tentrem merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang pembedaan suku, agama, ras, golongan dan status sosial serta saling menghormati antar masyarakat

Marem merupakan sebuah kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

Gandem merupakan sebuah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi, inovatif, dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

MISI

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Temanggung di atas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dalam 3 (tiga) Misi Daerah, yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tahun 2019 – 2023 harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama.

Disamping hal tersebut, pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sistem, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan

sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Identitas atau Branding yaitu:

“TEMANGGUNG BUMI BUDAYA”

Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa beraneka ragam budaya yang dimiliki Kabupaten Temanggung bisa dan layak untuk diangkat ke Java International Culture Festival.

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama (5) lima tahun mendatang dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung melaksanakan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung yaitu Misi 2 yaitu : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan. Ruang lingkup program dan kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung meliputi : program pengembangan industri, program pengembangan perdagangan, program pengelolaan pasar, program pengembangan koperasi dan UKM

1.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Perangkat Daerah pada dasarnya harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Namun seiring dinamika dan tuntutan yang berkembang, perangkat daerah diharapkan mengembangkan peluang pelayanan baru tanpa keluar dari batasan tupoksi. Salah satu peluang tersebut adalah dengan menelaah amanat Renstra Kementerian terkait yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UKM serta Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah sehingga diantara

pelaksana urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM terdapat sinkronisasi dan penyesuaian.

RENSTRA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan dokumen Renstra Kementerian Perdagangan 2015-2019. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan perdagangan sebagai berikut: Visi Kementerian Perdagangan mengikuti visi pemerintah yaitu: “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-royong”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan

Dalam rangka mewujudkan Visi “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong- royong”, maka misi pemerintahan periode 2015 – 2019 adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya, untuk menjembatani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019 dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian

Perdagangan periode 2015- 2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Tujuan Untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintahan periode 2015- 2019 yang dijembatani melalui misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2015 2019 yaitu:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. Peningkatan perlindungan konsumen;
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan di atas, tujuan/indikator yang bisa ditetapkan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung antara lain :

- Peningkatan pengamanan perdagangan
- Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya
- Peningkatan perlindungan konsumen
- Pertumbuhan ekspor non migas
- Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional

Berdasarkan telaahan terhadap substansi pokok dari Renstra Kementerian Perdagangan di atas, maka sebagian besar kebijakan yang selaras dengan kebijakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Temanggung. Kebijakan dan program yang perlu memperoleh penajaman adalah :

- a. Penciptaan jaringan distribusi yang efisien melalui penciptaan sarana dan kebijakan distribusi serta layanan yang mendukung dan sinergis. Pemasaran produk unggulan daerah baik secara promosi atau mengikuti pameran pameran dan kemitraan dengan pasar modern maupun secara online.
- b. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri dengan melakukan reformasi birokrasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan dengan pusat. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung perlu terus melakukan reformasi birokrasi khususnya terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan sehingga menjadi terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi usaha perdagangan. Pelayanan yang berstandar harus terus diupayakan sinergi dengan target Renstra Kemendag dengan target waktu pelayanan yang makin dipercepat. Selain itu perlu ditunjang oleh regulasi yang memberikan daya tarik berusaha tanpa mematikan usaha lain yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan kebijakan Pusat.
- c. Peningkatan kinerja perdagangan dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi promosi dan penciptaan kebijakan perdagangan yang sesuai. Program pemberdayaan ekonomi kreatif perlu memperoleh perhatian serius karena terbukti besar potensinya bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Ditunjukkan oleh kontribusinya yang besar terhadap PDRB daerah, ekonomi kreatif sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Temanggung yang lebih mengandalkan sumberdaya manusia sebagai modal dasar pembangunannya.

RENSTRA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Visi Kementerian Perindustrian 2015-2019 adalah “Indonesia menjadi negara industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang kuat berbasiskan sumber daya alam dan berkeadilan”.

Adapun misinya ada 4, yaitu :

1. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan;

2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perwujudan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional;

Berdasarkan misi tersebut, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran industri dalam perekonomian nasional.
- b. Meningkatkan penyebaran dan pemerataan industri.
- c. Meningkatkan peran IKM dalam perekonomian nasional.
- d. Meningkatkan pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi.
- e. Meningkatkan struktur.
- f. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
- g. Meningkatkan ketahanan industri melalui pemberian fasilitasi.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ditetapkan program yang relevan dengan kebijakan Kabupaten Temanggung, yaitu : Program Pengembangan Industri. Program ini dijabarkan ke dalam berbagai rencana aksi, yaitu :

1. Pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu;
2. Pengembangan Industri Kreatif;
3. Pengembangan IKM melalui pendekatan One Village One Product (OVOP);
4. Pengembangan Wirausaha Baru.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Perindustrian di atas, kebijakan serta program yang relevan dengan Kabupaten Temanggung sehingga perlu memperoleh fokus di masa mendatang adalah :

- a. Pengembangan Industri kreatif. Program ini selaras dengan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Temanggung. Inventarisasi terhadap industri yang telah bertumbuh merupakan langkah awal dalam pengembangan program ini. Selanjutnya disusun program pemberdayaan dan pengembangannya sehingga potensi kreatif masyarakat dapat dioptimalkan dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus ekonomi daerah.

- b. Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP (one village one product). Program ini perlu lebih memperoleh perhatian sebagai bagian penting dari upaya pengembangan potensi industri sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD. Meskipun program ini dilaksanakan oleh tingkat Kecamatan melalui program Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, namun Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai perlu melakukan pembinaan kepada Kecamatan. Diharapkan akan muncul komoditas potensial yang akan jadi fokus pengembangan ke depan melalui program yang lebih komprehensif dan menjadikannya sebagai fondasi atau kompetensi inti ekonomi kecamatan.

RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 2015–2019, upaya pemberdayaan KUMKM secara nasional diarahkan melalui visi “Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional” dengan misi terdiri atas :

- a. Mengimplementasikan good governance / tatakelola pemerintahan yang baik.
- b. Menumbuhkan dan rnengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM.
- c. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.
- d. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
- e. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi.

Dari visi dan misi tersebut, terdapat 5 (lima) fokus prioritas yang ingin di-capai dalam pemberdayaan KUMKM periode 2015 –2019 yang meliputi :

- a. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM.
- b. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif.
- c. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM.
- d. Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM.
- e. Penguatan kelembagaan Koperasi.

Sebagai percepatan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM RI juga mengeluarkan 7 Key Development Milestones yang terdiri atas :

- a. Peningkatan nilai ekspor sebesar 20%.
- b. Koperasi berkualitas bertumbuh sebanyak 5.000 unit per tahun.

- c. Tersedianya 49 system informasi KUKM online.
- d. Kredit Usaha Rakyat terdistribusi sebesar 13 triliun per tahun.
- e. 1.000 Sarjana Calon Wirausaha Baru.
- f. 100 program OVOP berhasil.
- g. 3 koperasi berskala besar di setiap provinsi.

1.4 Telaah Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan satu kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Oleh karena itu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung dengan potensi pertanian, perikanan dan perkebunan diharapkan akan lebih menarik investor untuk melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Temanggung. Dengan melakukan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi pengembangan usaha, diharapkan akan tumbuh wirausaha baru yang tangguh dan kompetitif serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas pelaku usaha yang sudah baik dari segi organisasi dan manajemen, dari segi produksi, teknologi, perodalan maupun pemasaran sehingga kegiatan usaha yang ada akan semakin tangguh dan berkualitas/ fasilitasi juga diberikan dalam hal peningkatan kerjasama kemitraan antar pelaku usaha itu sendiri maupun dengan instansi pemerintah seperti pembentukan kelompok usaha, pembentukan sentra-sentra usaha, kluster usaha, kemitraan dalam hal penyediaan bahan baku, kemitraan dalam hal pemasaran maupun kemitraan dalam hal permodalan.

Berdasarkan potensi dan upaya-upaya tersebut diharapkan ada peningkatan yang signifikan pada kegiatan usaha baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dengan peningkatan jumlah pelaku usaha baik perindustrian dan perdagangan peningkatan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, peningkatan kualitas kelembagaan usaha, peningkatan jaringan pemasaran, peningkatan permodalan, peningkatan kerjasama kemitraan dan peningkatan kesadaran tertib niaga diharapkan akan menciptakan usaha yang tangguh, mandiri, profesional yang bisa menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Temanggung, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan

penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta daya beli masyarakat.

Seluruh pembangunan dan pengembangan usaha industri, perdagangan disesuaikan dengan penataan ruang dan wilayah sesuai Peraturan Daerah tentang RTRW dimana telah ditentukan dengan jelas rencana penegmabnagan berbasis kawasan baik kawasan industri, kawasan peruntukan industri, sentra industri, kluster indusri maupun kawasan perdagangan.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal (15) disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Disamping itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, termasuk memaduserasikan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup, fungsi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kabupaten/ kota.

Dalam kajian lingkungan hidup strategis RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2019–2023 diidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) pilar yaitu :

- a. Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial
- b. Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi
- c. Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan
- d. Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar ekonomi meliputi lima TPB yaitu Tujuan 7 Energi bersih & terjangkau, Tujuan 8 Pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi, Tujuan 9 Industri, inovasi, & infrastruktur, Tujuan 10 Berkurangnya kesenjangan, dan Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan.

3. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 –2031 dimana penataan ruang daerah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan social budaya masyarakat dalam kesatuan system wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka dalam kebijakan pembangunan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung senantiasa memperhatikan industri konektivitas serta potensi daerah yang ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima masyarakat. Penumbuhan usaha–usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal dan potensi unggulan yang ada serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber –sumber energi memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh perindustrian perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan komparatif. Pengembangan industri perdagangan koperasi dan UKM juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategis, hal ini tentunya selaras dengan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah pada RPJMD Kabupaten Temanggung 2019–2023. Selain itu pembangunan industri perdagangan koperasi dan UKM 2019–2023 juga diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi yang terbarukan, melakukan pengolahan limbah secara terpadu, menekan penggunaan bahan kimia berbahaya, serta meningkatkan jumlah produk –produk makanan lokal. Hal tersebut perlu dilakukan guna mempersiapkan industri perdagangan koperasi dan UKM dalam memasuki tataran ekonomi hijau (*green economic*) yang kompetitif dan adanya perubahan selera masyarakat yang semakin ingin kembali kealam.

4.2 Penentuan Isu – isu Strategis

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka isu strategis bidang industri perdagangan koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung adalah :

Kekuatan:

1. Kebijakan pemerintah daerah yang kondusif;
2. Desain produk industri kecil menengah yang fleksibel;

3. Perlindungan terhadap usaha kecil menengah (pedagang tradisional);
4. Kesadaran masyarakat yang tinggi atas pentingnya berkoperasi untuk mengatasi masalah bersama;
5. Kemampuann ekspor yang berkualitas.

Kelemahan

1. Kualitas dan kuantitas bahan baku yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Harga bahan penolong yang terus meningkat;
3. Permasalahan pendirian dan SDM koperasi yang belum memadai;
4. Lemahnya koordinasi antar pelaku sektor industri;
5. Jiwa kewirausahaan yang lemah;
6. Tidak ada penghargaan terhadap pengurus koperasi.

Peluang

1. Adanya Pasar bebas;
2. Permintaan terhadap produksi industri kecil menengah yang terus meningkat;
3. Banyaknya embrio koperasi;
4. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung koperasi.

Tantangan

1. Krisis keuangan global berakibat terhadap penurunan permintaan produk;
2. Pesaing dari daerah lain yang memproduksi barang sejenis;
3. Prekondisi eco labeling dari pasar global;
4. Negara tujuan ekspor dan komoditi yang semakin mengerucut;
5. Era perdagangan bebas yang menyuburkan ideologi kapitalis.

Isu isu strategis

1. Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah di sektor industri sehingga terbentuk ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh
2. Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal yang memadai sehingga menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat
3. Membangun kemampuan kewirausahaan masyarakat Temanggung sehingga terbentuk ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh

4. Penyediaan data base yang komprehensif sehingga dapat menjadi bahan dasar pengambilan kebijakan secara lebih tepat;
5. Membangun jaringan kerjasama antara pemerintah , swasta dan perajin untuk meningkatkan kualitas produk dan pemasaran;
6. Revitalisasi koperasi dan optimalisasi pengurus dan fungsi koperasi;
7. Peningkatan kualitas dan daya saing UKM .